

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
WAJIB PAJAK**

(Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

Oleh :

**ARIS HIDAYAT
2240057024**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
WAJIB PAJAK**

(Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

**ARIS HIDAYAT
2240057024**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan “sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lain.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Aris Hidayat

NIM : 2240057024

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 04 Februari 2025



Aris Hidayat
NIM : 2240057024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Aris Hidayat
NIM : 2240057024
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib
Pajak (Studi Putusan Nomor:
499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 4 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

NIDN 0020096802

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN 0327046303

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Aris Hidayat
NIM : 2240057024
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak
(Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.Sel).

oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji

**Jabatan dalam Tim
Penguji**

Tanda Tangan

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Ketua

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Anggota

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Anggota



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

Halaman Pengesahan

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat
Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.Sel).**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : **Aris Hidayat**
NIM : **2240057024**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Telah Diperiksa di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 04 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat:

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Aris Hidayat
NIM : 2040057024
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib
Pajak (Studi Putusan Nomor:
499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 2025

Yang menyatakan,



**Aris Hidayat
NIM : 2240057024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Di dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil rektor akademik Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.
5. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi untuk arahan dan masukannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Para Pembantu Dekan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah.
7. Keluarga kecilku terkasih Arie Handayani, S.E., istriku tercinta dan anak-

anakku tercinta, Nadya Putri Hidayat dan Nindya Putri Hidayat.

8. Keluargaku terkasih yang selalu mendukung dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum, ayahanda tercinta, Drs. H. Jarwono, ibunda tercinta Sriyatun, S.Pd., dan kakak-kakak tercinta, Diah Handayani, S.Pd., Rokhmad Sya'bani, S.E., M.M., beserta ipar-iparku terkasih serta keponakan-keponakan yang kukasihi.
9. Sahabat-sahabat tercinta, Stevanus Herdi Pardamaian Aruan, SE., Ak., M.Si., Ahsan Fahmi Ula, S.E., Ak., M.M., Dra. Maria Ariani Aruan, S.H., M.H., yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama penulis menyelesaikan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekanku, teman-teman seperjuangan kelas Karyawan FH UKI dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu (*you know who you are*).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan rendah hati penulis menerima masukan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang di kemudian hari.

Jakarta, 04 Februari 2025


Aris Hidayat
2240057024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
VISI MISI.....	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	20
A. Tinjauan Mengenai Teori-Teori.....	20
1. Teori Penegakan Hukum	20

2.	Teori Kewenangan.....	22
B.	Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	26
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Pajak	35
1.	Pengertian Pajak	35
2.	Dasar Hukum Pajak	35
3.	Jenis-Jenis Pajak.....	37
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Perpajakan	38
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	38
BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA		
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK		43
A.	Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap	43
B.	Delik dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap	45
C.	Unsur-Unsur Pasal Dan Metode Interpretasi Dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap	47
D.	Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap.....	52
E.	Jenis Delik dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap	52
F.	Sanksi dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap	55
G.	Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	59

BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN SPT DALAM PUTUSAN NOMOR 499/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL.....	62
A. Posisi Kasus	62
B. Resume Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.....	63
C. Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel	64
D. Pertimbangan Hukum Hakim	67
E. Analisis Putusan Dalam Perspektif Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon	71
BAB V PENUTUP	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

- A. Nama : Aris Hidayat
B. NIM : 2240057024
C. Program Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana
Departement
D. Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi :
Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)”
E. Halaman : i-xvi, 78 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Tindak pidana perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT),
kepatuhan pajak, penegakan hukum, UU KUP.
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan fokus pada Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Dalam sistem perpajakan Indonesia, penyampaian SPT merupakan kewajiban hukum bagi setiap Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT, baik berupa keterlambatan, ketidaksesuaian isi, maupun pengisian yang tidak benar, dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana. Tindak pidana perpajakan ini memiliki implikasi yang luas terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam penyampaian SPT berdasarkan putusan pengadilan, menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case study*), yang berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel serta relevansi putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Data yang digunakan meliputi peraturan hukum terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum yang membahas tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan serta mendukung upaya negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian SPT

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada penguatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan transparansi dalam pemeriksaan pajak, serta edukasi dan sosialisasi bagi Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Dengan adanya pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa harus selalu bergantung pada ancaman sanksi pidana, sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

- H. Daftar Acuan : 33 buku, 6 peraturan perundang-undangan, jurnal/
artikel
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, 04 Februari 2025

Penulis,



Aris Hidayat
2240057024



ABSTRACT

- A. Name : Aris Hidayat
B. NIM : 2240057024
C. Specific Program : Public Law
D. Title : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Studi
Putusan Nomor: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)”
E. Page : i-xvi (roman) pages + 78 (numeric) pages +
bibliography
F. Keyword : Tax crime, Tax Return (SPT), tax compliance, law
enforcement, UU KUP.
G. Summary :

This examination delves into the judicial assessment of criminal offenses associated with the filing of Tax Returns (SPT) by Taxpayers, particularly focusing on Decision Number: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. The tax framework in Indonesia stipulates that all taxpayers are required to submit an SPT, as outlined in Law Number 28 of 2007 regarding General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). The omission of an SPT, whether due to tardiness, discrepancies in its content, or errors in its completion, may lead to both administrative and criminal repercussions. The ramifications of this tax offense are profound, influencing governmental efforts to enhance state revenues and elevate taxpayer adherence to regulations. This research aims to undertake a thorough examination of the elements associated with criminal offenses pertaining to the submission of SPT, guided by judicial rulings. This research will further investigate the rationale employed by judges in their decision-making processes while also evaluating the efficacy of law enforcement in addressing tax violations within the Indonesian framework.

This research employs a normative legal methodology, utilizing a case study approach that centers on the examination of Decision Number: 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and its pertinence to the tax laws and regulations in Indonesia. The materials referenced comprise pertinent legal statutes and regulations, judicial rulings, and scholarly articles addressing tax infractions. The research findings demonstrate that, in this instance, the defendant has been established to have fulfilled the conditions for a tax violation as delineated in Article 39, paragraph (1) of the KUP Law, particularly through the intentional omission of an SPT or the submission of an SPT with inaccuracies, thereby leading to detriment to state revenue. The judge's deliberations in this ruling reflect the foundational tenets of justice and legal certainty, with the penalties enacted intended to serve as a deterrent for taxpayers who breach regulations and to bolster state efforts focused on enhancing tax compliance.

The research findings suggest that the implementation of criminal sanctions for the non-submission of an SPT constitutes a fundamental component of the overarching law enforcement framework within the Indonesian tax system. Nevertheless, the efficacy of law enforcement is not solely contingent upon the enforcement of criminal penalties; it also necessitates the enhancement of the tax administration structure, the augmentation of transparency in tax audits, and the cultivation of awareness among taxpayers about the significance of tax compliance. Through the implementation of a more comprehensive approach, there

is a sense of hope that tax compliance may be enhanced without the ongoing dependence on the coercive nature of criminal penalties, thus fostering a more equitable and enduring tax system.

- H. *Reference List* : 31 books, 6 legislations, 5 journals/articles
I. *Thesis Advisor I* : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Thesis Advisor II : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, February 04th, 2025

Writer



Aris Hidayat

2240057024

